



<http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/>

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis

| ISSN (Print) 2355-0627 | ISSN (Online) 2355-097X |



# PENGARUH IPM, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

Adelia Dara Agustyn<sup>1</sup>, Saiful Badli<sup>2</sup>, Yenny Ertika<sup>3</sup>, Helmi Noviar<sup>4</sup>, Dian Ariani<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar, [adeliadaraagustyn@gmail.com](mailto:adeliadaraagustyn@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Teuku Umar, [Saiful.badli@utu.ac.id](mailto:Saiful.badli@utu.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Teuku Umar, [yenniertika@utu.ac.id](mailto:yenniertika@utu.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Teuku Umar, [helminoviar@utu.ac.id](mailto:helminoviar@utu.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Teuku Umar, [dianariani@utu.ac.id](mailto:dianariani@utu.ac.id)

### ARTICLE INFORMATION

Received: 2025-05-21

Revised: 2025-05-26

Accepted: 2025-05-27

Available online: 2025-11-1

### KEYWORDS

Poverty, Human Development Index, Provincial Minimum Wage, Regional Expenditure

### CORRESPONDENCE

E-mail: [Saiful.badli@utu.ac.id](mailto:Saiful.badli@utu.ac.id)

### ABSTRACT

*This study examines the influence of the Human Development Index (HDI), provincial minimum wage, and regional expenditure on poverty levels in West Aceh Regency during the period 2011–2023. The research adopts a quantitative approach using multiple linear regression methods and secondary data from the West Aceh Central Statistics Agency (BPS). The analysis is conducted using EViews 10 software to test the partial and simultaneous effects of the independent variables on the dependent variable, namely the number of poor people. The results of the analysis show that, partially, HDI has a negative and significant effect on poverty, indicating that an increase in HDI correlates with a decrease in poverty. In contrast, provincial minimum wage and regional expenditure show negative but not significant effects, revealing that increases in wages and regional spending alone are not sufficient to significantly reduce poverty in West Aceh. This may be due to other factors such as suboptimal budget allocation and an economy still dominated by the informal sector. However, the simultaneous analysis indicates that HDI, provincial minimum wage, and regional expenditure collectively have a significant impact on poverty. These findings highlight the importance of a holistic approach to poverty alleviation, involving improvements in HDI, increases in minimum wages, and the optimization of budget allocation and spending effectiveness. Future research may consider other factors that contribute to poverty in West Aceh in order to develop a more comprehensive model.*

### 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan bukan semata masalah ekonomi, melainkan juga berdampak pada aspek sosial, budaya juga kesejahteraan secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras menanggulangi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi persoalan yang sulit diatasi secara menyeluruh. Menurut (Muttajien et., al, 2022), kemiskinan berkaitan dengan banyak aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara di perhatikan sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian menurut (Kemenkeu RI, 2024) penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin.

Salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi adalah Provinsi Aceh, di mana Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu daerah yang cukup terdampak. Berdasarkan data dari BPS, Provinsi Aceh masih menempati peringkat keenam sebagai provinsi termiskin di Indonesia, dan menduduki posisi pertama di Pulau Sumatera pada tahun 2023 dengan angka 14,45%.

Gambar 2 Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat



Khususnya di Kabupaten Aceh Barat, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Peningkatan IPM dan upah minimum provinsi belum berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.

Faktor yang mempengaruhi tingginya kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat diantaranya :

1. IPM, merupakan ukuran kualitas hidup masyarakat dalam hal Pendidikan, Kesehatan, dan standar hidup.
2. Upah minimum provinsi, instrumen kebijakan yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
3. Belanja Daerah, merupakan cerminan kebijakan fiskal daerah yang bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IPM yang tinggi seharusnya berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik (Panjawa & Soebagiyo, 2014). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak serta-merta menurunkan kemiskinan di Aceh Barat. Hal serupa terjadi pada UMP dan belanja daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi belum mampu secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin. Banyak pekerja yang masih menerima upah di bawah UMP, dan belanja daerah belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau sektor-sektor yang berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan. Atas dasar permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menganalisis pengaruh tiga variabel terhadap kemiskinan di Aceh Barat, baik secara individual maupun bersamaan, untuk mendukung perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA / PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik dari sisi makanan, pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal. Menurut World Bank (2004), kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam menikmati hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan harga diri. Kemiskinan secara konseptual bukan hanya sekadar kondisi ekonomi yang mencerminkan ketidakmampuan individu mencukupi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan rumah, tetapi juga merupakan isu multidimensi yang menyentuh aspek sosial, struktural, dan geografis. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan telah menjadi perhatian utama karena tingginya ketimpangan antar wilayah dan kompleksitas kondisi sosial budaya. Seperti yang dijelaskan oleh Affandi *et al.* (2022), salah satu penyebab stagnasi tingkat kemiskinan di Aceh adalah ketergantungan provinsi ini terhadap dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, yang belum diimbangi dengan kemandirian ekonomi daerah. Ketergantungan ini menyebabkan Aceh tidak mengalami perkembangan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia. Lebih lanjut, Affandi *et al.* (2025) menyoroti bahwa fluktuasi angka kemiskinan di berbagai wilayah juga sangat dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi makro. Situasi ini diperburuk oleh faktor eksternal seperti pandemi dan pemutusan hubungan kerja, yang mempersempit akses masyarakat terhadap sumber penghidupan. Sementara itu, Siregar dan Ramadhan (2020) menekankan bahwa akar kemiskinan di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh keberagaman kondisi geografis, budaya, dan struktur sosial masyarakat yang menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan menjadi tidak seragam hasilnya di tiap wilayah. Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan tidak hanya pendapatan, tetapi juga akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

### Indeks Pembangunan Manusia

IPM yang mengukur umur Panjang dan sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup layak, menjadi tolak ukur utama kualitas hidup dan pembangunan manusia. Peningkatannya menandakan kemajuan sumber daya manusia dan berpotensi mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian Falah dan Rahmawati (2024), dijelaskan bahwa IPM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama dengan meningkatnya pendapatan dan kualitas sumber daya manusia. Mereka berpendapat bahwa dengan meningkatnya IPM, maka kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat pun membaik, sehingga masyarakat lebih mampu berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif. IPM merupakan indikator pembangunan yang mencakup tiga dimensi utama pembangunan: kesehatan (diukur dari umur harapan hidup), pendidikan (diukur dari lama sekolah), dan standar hidup layak. IPM digunakan sebagai parameter dalam menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM yang tinggi umumnya dikaitkan dengan rendahnya tingkat kemiskinan, karena menandakan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai serta pendapatan yang mencukupi. IPM mengukur kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Peningkatan IPM diyakini dapat menurunkan kemiskinan karena memperkuat produktivitas masyarakat.

### Upah Minimum Provinsi

Upah minimum provinsi merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai perlindungan bagi pekerja. Teori upah menyatakan bahwa peningkatan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Namun, efektivitas UMP tergantung pada kepatuhan pelaku usaha dan kondisi ekonomi lokal. Jika tidak dijalankan dengan baik, UMP yang tinggi bisa menimbulkan efek negatif seperti pengurangan tenaga kerja atau meningkatnya informalitas kerja. UMP dirancang sebagai salah satu bentuk perlindungan pendapatan bagi pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Dalam praktiknya, efektivitas UMP sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan masih sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha serta besarnya sektor informal di daerah.

Sugesti dan Usman (2024) membuktikan bahwa peningkatan UMP secara signifikan berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan di 15 provinsi termiskin di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa upah minimum yang memadai mampu meningkatkan daya beli pekerja dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan struktural. UMP bertujuan: Secara makro, meningkatkan daya beli dan pemerataan pendapatan sedangkan secara mikro, melindungi pendapatan minimum pekerja. UMP diyakini berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena meningkatkan pendapatan kelompok

bawah, meskipun efektivitasnya sangat tergantung pada kepatuhan perusahaan dan pengawasan pemerintah.

### Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrument krusial dalam kebijakan fiskal daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran yang tepat, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial, diyakini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan publik, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Falah dan Rahmawati (2024), belanja daerah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Mereka menekankan bahwa kebijakan alokasi belanja yang diarahkan untuk pengembangan SDM dan peningkatan infrastruktur dasar berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah.

Fitriyanti dan Handayani (2020) mengkritisi bahwa efektivitas belanja daerah sangat tergantung pada komposisi belanja. Mereka menemukan bahwa porsi belanja untuk pegawai dan belanja barang/jasa jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat. Akibatnya, meskipun belanja daerah tinggi, pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan tetap tidak signifikan. Sementara itu, Risdiyanto *et al.* (2023) menambahkan bahwa tata kelola belanja daerah yang baik tidak hanya menurunkan kemiskinan tetapi juga menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan belanja daerah sangat ditentukan oleh arah alokasi dan pengawasan implementasi anggaran.

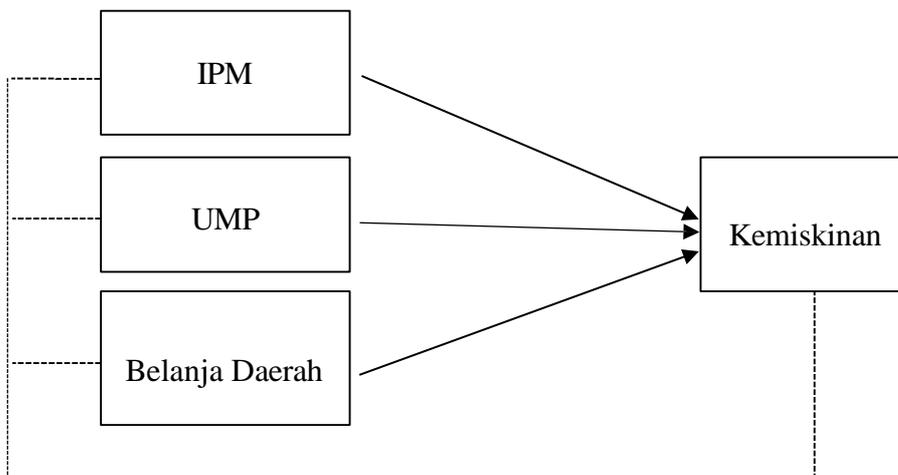
### Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat
2. Upah minimum provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat
3. Belanja daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

### Kerangka Pemikiran

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Gambar 2, Tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum provinsi, dan belanja daerah akan mempengaruhi kemiskinan. Jika tingkat sumber daya manusia rendah maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi dan sebaliknya. Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh upah minimum, semakin tinggi upah minimum provinsi maka semakin rendah tingkat kemiskinan dan sebaliknya. Penyebab lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu belanja daerah, karena belanja daerah memacu pertumbuhan ekonomi melalui belanja publik dan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program kesejahteraan sosial.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan berlokasi di Kabupaten Aceh Barat. Studi ini meneliti dampak IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Aceh Barat. Periode penelitian ini mencakup 13 tahun, yaitu tahun 2011 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan studi literatur dari buku, jurnal, dan sumber daring.

Analisis data dilakukan menggunakan Eviews 10 dan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk model regresi linier berganda, persamaan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Untuk mempermudah pemahaman, model persamaan (1) diubah menjadi model persamaan (2)

seperti berikut:

$$\text{LnY} = a + b_1\text{IPM} + b_2\text{LnUMP} + b_3\text{LnBD} + e \dots (2)$$

Keterangan :

- LnY = Ln Kemiskinan
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- LnUMP = Ln Upah Minimum Provinsi
- LnBD = Ln Belanja Daerah
- e = Variabel Pengganggu

Data penelitian jumlah penduduk miskin, upah minimum provinsi, dan belanja daerah diubah ke dalam bentuk logaritma natural (Ln), menurut (Sugiyono, 2019) penggunaan logaritma natural (Ln) dalam penelitian dimaksud untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil

Tabel berikut menyajikan hasil hasil pengujian pengaruh IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Aceh Barat menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 1. Hasil estimasi regresi linier berganda

VARIABEL	KOEFISIEN	STD. ERROR	t-Hitung	PROB.
C	1284.424	39.63332	32.40769	0.0000
IPM	-0.011166	0.003744	-2.982634	0.0154
UMP	-0.040380	0.043002	-0.939048	0.3722
BD	-0.041042	0.034849	-1.177706	0.2691

(Sumber: Hasil regresi, 2025)

Berdasarkan analisis regresi berganda pada tabel tersebut, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

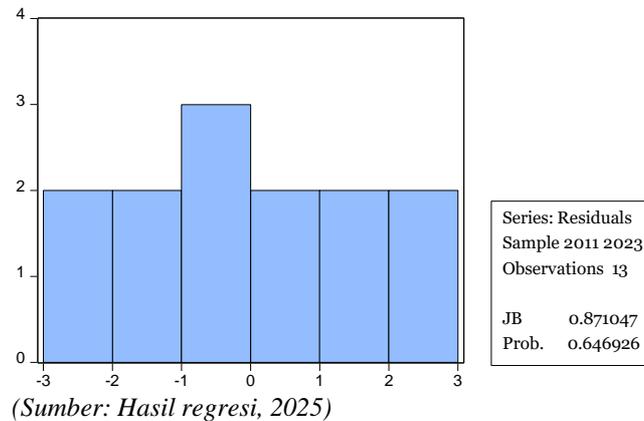
$$\text{LnY} = 1284.424 - 0.011166\text{IPM} - 0.040380\text{LnBD} - 0.041042\text{LnUMP} + e$$

Interpretasi model persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta 1284.424 menunjukkan Tingkat kemiskinan jika IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah bernilai 0.
2. Koefisien IPM (-0.011166) menunjukkan hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan. Peningkatan IPM sebesar 1 persen diprediksi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.011166 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien upah minimum provinsi (-0.040380) menunjukkan hubungan negatif antara upah minimum provinsi dan kemiskinan. Peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1 persen diprediksi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.040380 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien belanja daerah (-0.041042) menunjukkan hubungan negatif antara belanja daerah dan kemiskinan. Peningkatan belanja daerah sebesar 1 persen diprediksi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.041042 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



Uji Jarque-Bera (JB) menghasilkan nilai probabilitas 0,646926, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis nol bahwa residual terdistribusi normal tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, asumsi kenormalam residual dalam model regresi terpenuhi.

### b. Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

VARIABEL	VIF
C	NA
IPM	2.061395
UMP	6.761833
BD	4.895808

(Sumber: Hasil regresi, 2025)

Hasil analisis menunjukkan tidak adanya masalah mutikolinearitas pada model regresi. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel prediktor (IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah) berada dibawah ambang batas 10, artinya variabel-variabel tersebut tidak saling berkorelasi tinggi.

### c. Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	1061.385
S.D. dependent var	4.574175
Akaike info criterion	4.394379
Schwarz criterion	4.568210
Hannan-Quinn criter.	4.358649
Durbin- Watson stat	2.202919

(Sumber: Hasil regresi, 2025)

Durbin-Watson (DW) dengan nilai 2.202919 berada di atas  $d_U = 1.6769$ . Ini berarti nilai DW menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Oleh karena itu, uji autokorelasi dalam regresi data *time series* telah terpenuhi.

d. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas tes : Breusch-Pagan-Godfrey	
Obs*R-squared	Prob. Chi-Square(3)
0.855585	0.8361

*(Sumber: Hasil regresi, 2025)*

Uji Chi-Square menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,8361, melebihi tingkat signifikansi 0,05 atau  $0.8361 > 0,05$ . Oleh karena itu, hipotesis tentang tidak adanya heteroskedastisitas diterima. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

**Pengujian Hipotesis**

a. Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 5. Hasil Regresi Uji t**

VARIABEL	KOEFSIEN	STD. ERROR	t-Hitung	PROB.
C	1284.424	39.63332	32.40769	0.0000
IPM	-0.011166	0.003744	-2.982634	0.0154
UMP	-0.040380	0.043002	-0.939048	0.3722
BD	-0.041042	0.034849	-1.177706	0.2691

*(Sumber: Hasil regresi, 2025)*

Hasil pengujian pengaruh IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat disajikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat signifikan ( $t = -2,982, p = 0,0154 < 0,05$ ).
2. Pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat tidak signifikan ( $t = -0,939, p = 0,3722 > 0,05$ ).
3. Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat tidak signifikan ( $t = -1,177, p = 0,261 > 0,05$ ).

b. Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 6. Uji Simultan**

R-squared	0.867304	Mean dependent var	1061.385
Adjusted R-squared	0.823072	S.D. dependent var	4.574175
S.E. of regression	1.924028	Akaike info criterion	4.394379
Sum squared resid	33.31697	Schwarz criterion	4.568210
Log likelihood	-24.56346	Hannan-Quinn criter.	4.358649
F-statistic	19.60802	Durbin- Watson stat	2.202919
Prob(F-statistic)	0.000276		

*(Sumber: Hasil regresi, 2025)*

Uji F menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan dari IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah terhadap kemiskinan (Prob-F = 0.000276).

c. Koefisien Determinasi

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

R-squared	0.867304	Mean dependent var	1061.385
Adjusted R-squared	0.823072	S.D. dependent var	4.574175
S.E. of regression	1.924028	Akaike info criterion	4.394379
Sum squared resid	33.31697	Schwarz criterion	4.568210

Log likelihood	-24.56346	Hannan-Quinn criter.	4.358649
F-statistic	19.60802	Durbin- Watson stat	2.202919
Prob(F-statistic)	0.000276		

(Sumber: Hasil regresi, 2025)

Model regresi menjelaskan 86,7% varians kemiskinan, sedangkan 13,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

## Pembahasan

### a) Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

IPM di Kabupaten Aceh Barat sudah sangat baik karena dapat dilihat dari segi kesehatan dan pendidikannya, yang dimana akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan sudah sangat memadai untuk dijangkau, contohnya seperti layanan pada kesehatan, pemerintah memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Falah & Rahmawati, 2024), (Anggoro & Kriwibowo, 2023), dan (Nufus & Husein, 2021); (Juliansyah & Salim, 2024) yang menjelaskan bahwa IPM berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di suatu wilayah, karena peningkatan IPM meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan dengan demikian kemampuan masyarakat karena peningkatan produktivitas dapat menaikkan penghasilan. Peningkatan IPM berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan penurunan angka kemiskinan.

### b) Pengaruh upah minimum provinsi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Upah minimum provinsi di Aceh Barat telah berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan, namun dampaknya masih terbatas karena banyak pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi dan masyarakatnya tidak semua bekerja pada sektor formal namun banyak yang berkerja pada sektor informal, dimana pendapatan tidak tetap dan berubah-ubah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Panjaitan, 2020) dan (Rahayu, 2017) yang menjelaskan peningkatan upah minimum provinsi berpotensi meningkatkan pendapatan Masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat akan terbebas dari masalah kemiskinan. Penerapan upah minimum provinsi terbatas pada sektor formal, sehingga tidak mencakup sektor informal. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya (Ihsan & Ikhsan, 2018) yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

### c) Pengaruh belanja daerah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Belanja daerah berpengaruh terhadap kemiskinan karena adanya anggaran yang dipruntukkan untuk kegiatan dan program, baik secara tidak langsung maupun langsung, namun belum signifikan dalam mengurang kemiskinan, yang disebabkan masih banyak jalan-jalan yang rusak di daerah perkampungan, yang dimana hal tersebut dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Nany et., al, 2022) dan (Fitriyanti & Handayani, 2020) yang menjelaskan bahwa realisasi belanja daerah yang lebih banyak belum tentu dapat menurunkan kemiskinan. Pemerintah daerah diharuskan mampu menyerap belanja daerah dan mengalokasikannya kearah pengentasan kemiskinan. Pengalokasian belanja daerah yang tepat dan efisien akan mampu mengurangi kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan (Siregar & Ramadhan, 2020) bahwa belanja daerah terbukti secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan dikarenakan belanja daerah tersebut digunakan dalam hal peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat pada suatu daerah dan tepat sasaran.

## 5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, artinya peningkatan IPM mampu menurunkan angka kemiskinan.
2. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan secara parsial, karena dominasi sektor informal. Namun secara simultan tetap berpengaruh terhadap kemiskinan.
3. Meskipun alokasi anggaran belum merata, sehingga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan secara parsial, belanja daerah secara keseluruhan tetap berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
4. Nilai R-Square sebesar 86,7% menunjukkan bahwa IPM, upah minimum provinsi, dan belanja daerah yang diteliti secara bersama-sama menjelaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, dengan sisanya 13,3% dipengaruhi faktor lain diluar lingkup penelitian ini.

## SARAN

1. Pemerintah daerah perlu memberdayakan UMKM dan melibatkan Masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
2. Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum harus diperkuat agar daya beli masyarakat meningkat dan kemiskinan menurun.
3. Alokasi belanja daerah sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur di pedesaan guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara merata dan efisien.
4. eneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta memperluas periode penelitian agar hasilnya lebih komprehensif dan akurat dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi & Hakim, Lukman. (2022). Peran Manusia Dan Sosial Budaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh, Indonesia. *Journal Of Southwest Jiaotong University*. Vol 57 No. 6.
- Affandi., Purwaningsih, Yunastiti., Hakim, Lukman., & Mulyaningsih, Tri. (2025) Interaksi Antara Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Dan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Pustaka Semi-Sistematis. *Journal Global Transitions* 7, 1-20.
- Anggoro, Dicky, & Kriswibowo, Arimurti. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2021. *International Journal Of Economics Development Research*. Volume 4(1).
- Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Belanja Daerah, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 1–16.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90.
- Ihsan, Khairil & Ikhsan. (2018). Analisis Pengaruh UMP, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 3 No. 3.
- Juliansyah, R., & Salim, J. F. (2024). Seberapa Kuat Pajak Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Menggoyahkan Kemiskinan Di Provinsi Aceh?. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6035-6046.
- Kemenkeu. (2024). Memahami Kembali Startegi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.
- Muttaqien., Fahmi, M. L., Triana, N., Fadli, J., & Rahman, B. (2022). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika*. Vol. 06 No. 01.

- Nany, Magdalena., Pratama, Daniel Budi., Prasetyaningrum, Murni., & Kusumaningsih, Astri Utami. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol. 22, No.3.
- Nufus, Jannatun & Husein, Ratna. (2021). Pengaruh PDB, Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Pada Kab/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika Indonesia*. Vol. 10, No. 1. Hal 33-43.
- Panjaitan, Mangasi. (2020). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 3, No 1. Hal 104-108.
- Panjawa, J. L., & Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. 15(1), 48–54.
- Rahayu, Tiya Pramesti. (2017). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Kota Magelang Tahun 2003-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1813–1822.
- Siregar, K. O., & Ramadhan, P. A. (2020). "Pengaruh belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*. Vol. 11, No. 2.
- Sugesti, Retno Ajeng & Usman, Moneyzer. (2024). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan di 15 Provinsi Termiskin di Indonesia. *International Journal Of Economics, Business and Innovation Research*. Volume 03, No 05.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. 2004. *Definisi Kemiskinan*. <http://www.worldbank.org>